

BAB II

DINAMIKA BERITA HOAKS DAN MEDIA SOSIAL PADA PEMILU 2024

2.1. Media Sosial

Media sosial telah bertransformasi menjadi sumber informasi utama bagi publik modern, termasuk di kalangan mahasiswa. Kecepatan dan jangkauan luas menjadi keunggulan utama media sosial dalam mendiseminasikan informasi; peristiwa atau berita dapat menyebar secara instan ke berbagai belahan dunia hanya dalam hitungan detik²⁸. Selain itu, media sosial memungkinkan partisipasi aktif dari pengguna, di mana setiap individu memiliki potensi untuk menjadi penyebar informasi tanpa perlu melalui proses penyaringan yang ketat seperti pada media tradisional. Lebih lanjut, algoritma media sosial memungkinkan personalisasi konten, menyajikan informasi yang disesuaikan dengan minat, preferensi, dan riwayat interaksi pengguna, sehingga meningkatkan relevansi dan daya tarik informasi yang diterima.

Namun di balik potensi positifnya, sifat media sosial yang terbuka dan kurangnya regulasi formal juga menghadirkan sejumlah tantangan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya memverifikasi kebenaran informasi yang beredar, yang membuka celah bagi penyebaran

²⁸ Rofiyanti, E., Agustina, D.U., & Firzah, M. (2024). Analisis Peran Media Sosial sebagai Platform Komunikasi dan Penyebaran Informasi Kebencanaan di DKI Jakarta. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*.

berita hoaks dan disinformasi. Hal ini diperparah dengan kecenderungan pengguna untuk lebih mempercayai informasi yang datang dari sumber yang dikenal atau sesuai dengan keyakinan yang sudah ada, tanpa melakukan pengecekan fakta yang memadai.

Teknologi web 2.0 kini mendorong perkembangan media sosial. Sebuah platform yang memungkinkan partisipasi pengguna dalam pembuatan dan distribusi konten dikenal sebagai teknologi Web 2.0. Perbedaannya dengan teknologi web 1.0 adalah bahwa pengelola platform tetap menjadi pusat penyampaian informasi²⁹. Media sosial adalah layanan berbasis web yang memungkinkan pengguna membuat profil publik atau semi-publik, menjalin koneksi dengan pengguna lain, serta melihat dan menelusuri daftar koneksi dalam sistem tertentu.

2.2. Berita Hoaks

Istilah hoaks dalam bahasa Inggris merujuk pada tipuan, kebohongan, informasi palsu. Berita bohong ialah berita yang isinya tidak selaras dengan kebenaran yang sesungguhnya³⁰. Tujuan dari berita hoaks bervariasi, mulai dari sekadar membentuk atau membentuk opini masyarakat, menguji kewaspadaan pengguna internet, hingga tujuan yang lebih serius. Penyebaran berita hoaks seringkali digunakan sebagai lelucon atau iseng belaka, namun tak jarang juga dimanfaatkan untuk menjatuhkan pesaing melalui kampanye

²⁹ Wisnuhardana A, *Anak Muda & Medsos: Memahami Geliat Anak Muda, Media Sosial, dan Kepemimpinan Jokowi dalam Ekosistem Digital*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2018), hlm. 89.

³⁰ Syahputra, A. K., Kurniawan, E., & Nofriadi. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Informasi UPT. Puskesmas Porsea. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 117. <https://jurnal.stmikroyal.ac.id/index.php/jurdimas/article/view/370>

hitam, melakukan promosi dengan cara menipu, atau bahkan mengajak masyarakat untuk melakukan amalan-amalan yang tidak jelas dasar hukumnya³¹. Ironisnya, banyak penerima hoaks tanpa berpikir panjang langsung menyebarkannya kepada orang lain, sehingga informasi palsu ini menyebar dengan sangat cepat.

Berita hoaks seringkali bersumber dari kabar bohong yang sengaja dibuat dan disebar dalam jaringan sosial tertentu untuk melindungi kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan, tak jarang pengguna media sosial secara sadar membagikan kebohongan untuk mendukung agenda yang telah direncanakan sebelumnya. Rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat membuat mereka rentan terhadap penggiringan opini melalui berita hoaks. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan hoaks mudah tersebar di Indonesia ialah kurangnya kebiasaan masyarakat untuk berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Isu-isu hoaks atau berita palsu yang mengandung fitnah dan kebohongan merupakan ancaman global yang bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sangat sulit untuk mengendalikan penyebaran berita hoaks yang dilakukan oleh pihak-pihak tanpa tanggung jawab, sebab siapa pun dapat dengan mudah menyebarluaskan informasi yang keliru. Lebih jauh lagi, penerima berita seringkali kurang kritis dalam memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima.

³¹ Suharyanto, C.E. (2019). ANALISIS BERITA HOAKS DI ERA POST-TRUTH: SEBUAH REVIEW. Masyarakat Telematika Dan Informasi : *Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi*.

2.2.1. Berita Hoaks Pemilu

Berita hoaks atau informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menipu dan menyesatkan publik, telah menjadi ancaman serius dalam era digital, terutama di masa-masa penting seperti pemilu. Berita hoaks pemilu dirancang dengan tujuan khusus yaitu untuk memanipulasi opini publik, membingungkan pemilih, dan mengarahkan persepsi mereka terhadap calon presiden atau partai politik tertentu. Hoaks ini biasanya disusun dengan sangat hati-hati agar tampak meyakinkan dan menarik emosi masyarakat. Ciri utama dari berita hoaks adalah narasinya yang sensasional dan memancing emosi, seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian, sehingga masyarakat mudah terpengaruh tanpa terlebih dahulu memeriksa kebenarannya. Sering kali, berita palsu tersebut berisi klaim-klaim yang ekstrem atau tidak masuk akal namun disajikan sedemikian rupa sehingga tampak seolah-olah didukung oleh fakta.

Penyebaran berita hoaks dalam pemilu bukanlah hal baru, tetapi meningkat drastis seiring dengan berkembangnya teknologi digital dan akses yang semakin mudah terhadap platform media sosial. Platform seperti TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, serta WhatsApp menjadi medium utama yang digunakan oleh penyebar hoaks untuk menyebarkan informasi palsu. Kemudahan berbagi konten secara instan di media sosial membuat berita hoaks dapat menjangkau audiens secara meluas dengan cepat. Misalnya, hanya dengan beberapa klik, sebuah informasi palsu dapat menyebar ke ribuan atau bahkan jutaan pengguna

dalam hitungan menit, tanpa ada proses verifikasi atau pemeriksaan fakta terlebih dahulu. Fenomena ini menunjukkan betapa rentannya masyarakat terhadap penyebaran informasi palsu, terutama di masa-masa pemilu ketika perdebatan politik sedang memanas.

Salah satu contoh nyata dari dampak berita hoaks dalam pemilu adalah pada Pemilu 2019 di Indonesia. Menurut data MAFINDO, lebih dari 1.000 berita hoaks teridentifikasi selama masa kampanye pemilu. Ini merupakan kemajuan yang berarti dibanding tahun sebelumnya, dan menunjukkan betapa massifnya penyebaran informasi palsu selama periode politik yang kritis tersebut. Berita-berita hoaks ini tidak hanya menyebar di media sosial seperti Facebook serta Twitter, tetapi juga melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, di mana pengguna dapat menyebarkan informasi dengan cepat kepada kelompok atau kontak pribadi mereka tanpa filter atau pemeriksaan. Hal ini semakin memperparah situasi karena berita hoaks yang disebarluaskan melalui grup-grup WhatsApp sering kali diterima begitu saja tanpa pengecekan lebih lanjut, terutama oleh orang-orang yang mungkin tidak memiliki literasi digital yang memadai.

Berita hoaks pemilu sering kali memiliki tujuan manipulatif yang sangat jelas, yaitu untuk merusak reputasi calon tertentu atau mendukung calon lain. Selama masa kampanye, buzzer politik dan akun-akun anonim sering digunakan untuk menyebarkan berita palsu. Buzzer ini bekerja untuk memperkuat narasi tertentu, biasanya atas

pesanan pihak yang berkepentingan dalam pemilu. Dengan menggunakan akun-akun anonim, penyebar hoaks dapat berlindung di balik ketidakjelasan identitas mereka, membuat mereka sulit dilacak atau dihentikan. Mereka memanfaatkan celah-celah dalam regulasi media sosial dan kelemahan sistem moderasi konten untuk menyebarkan berita-berita palsu yang dapat memengaruhi pemilih secara signifikan. Informasi palsu yang disebarkan dapat berupa tuduhan yang tidak berdasar terhadap calon, klaim tentang kebijakan yang salah kaprah, atau bahkan berita skandal yang sepenuhnya direayasa untuk merusak kredibilitas seorang kandidat.

Dampak dari penyebaran berita hoaks tidak hanya terbatas pada persepsi publik, tetapi juga dapat memengaruhi hasil pemilu secara langsung. Pemilih yang terpapar hoaks secara terus-menerus dapat mengubah preferensi politik mereka berdasarkan informasi yang salah. Hoaks yang beredar dengan tujuan politik sering kali dirancang untuk memecah belah masyarakat, menciptakan polarisasi, dan memperkuat prasangka atau stereotip terhadap kelompok tertentu. Misalnya, dalam konteks pemilu, berita palsu bisa digunakan untuk menargetkan calon dengan tuduhan korupsi yang tidak berdasar atau menyebarkan ketakutan terkait kebijakan calon tersebut.

Lebih jauh lagi, keberadaan berita hoaks tidak hanya mengganggu proses demokrasi tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik secara keseluruhan.

Ketika pemilih merasa bahwa informasi yang mereka dapatkan tidak bisa dipercaya atau bahwa hasil pemilu telah dimanipulasi oleh berita palsu, mereka cenderung menjadi apatis dan kehilangan keyakinan terhadap institusi-institusi demokrasi. Ini adalah bahaya jangka panjang yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.

2.3. Peran Media Sosial dalam Penyebaran Berita Hoaks

Media sosial kini menjadi jalur utama dalam distribusi informasi di era digital. Di sisi positif, media sosial memungkinkan arus informasi yang cepat dan efisien, memfasilitasi pertukaran ide dan opini secara real-time. Namun, sisi gelap dari perkembangan teknologi ini yakni kemudahan penyebaran informasi hoax. Berita hoaks adalah berita palsu yang disusun untuk menyesatkan masyarakat, dan sering kali digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, termasuk politik.

Dalam konteks pemilu, peran media sosial dalam penyebaran hoaks menjadi sangat penting. Platform seperti TikTok, Twitter, Instagram, dan WhatsApp memungkinkan pengguna untuk dengan mudah membagikan informasi tanpa adanya proses verifikasi atau penyaringan yang memadai. Ini berarti bahwa berita hoaks bisa tersebar begitu cepat, bahkan dalam hitungan menit, ke ribuan atau bahkan jutaan pengguna. Sebuah studi menunjukkan bahwa berita palsu sering kali lebih menarik perhatian pengguna dibandingkan dengan berita yang akurat, karena hoaks biasanya disusun dengan narasi sensasional yang membangkitkan emosi, seperti kemarahan, ketakutan, atau kebencian.

Penyebaran hoaks menjelang pemilu sering kali digunakan sebagai alat politik untuk memengaruhi persepsi pemilih. Misalnya, berita palsu dapat digunakan untuk menyerang kandidat tertentu, menyoroti skandal yang tidak pernah terjadi, atau memanipulasi fakta tentang kebijakan yang diusulkan. Sebuah studi di Bengkulu mengungkapkan bahwa menjelang Pemilu 2024, penyebaran berita hoaks meningkat secara signifikan. Hal ini selaras pada fenomena global, di mana berita hoaks lebih mudah menyebar pada momen-momen politik yang krusial, seperti pemilu. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan serius bagi masyarakat untuk memilah informasi yang benar dari yang palsu.

Algoritma media sosial juga berkontribusi terhadap percepatan penyebaran hoaks. Platform seperti Facebook dan Twitter menggunakan algoritma yang memprioritaskan konten yang memiliki interaksi tinggi, termasuk "like," "share," atau "retweet." Konten yang lebih provokatif atau kontroversial cenderung mendapatkan perhatian lebih besar, dan ini menciptakan ekosistem yang ideal bagi berita hoaks untuk berkembang. Hoaks yang disebar di media sosial sering kali memanfaatkan sentimen yang ada dalam masyarakat, seperti ketidakpuasan terhadap pemerintah, rasa takut terhadap perubahan, atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Ini membuat hoaks sangat efektif dalam memanipulasi opini publik.

Selain itu, sifat media sosial yang memungkinkan anonimitas membuat penyebar hoaks sulit dilacak. Akun-akun anonim, bot, dan troll sering digunakan untuk memperbanyak penyebaran berita palsu. Misalnya,

kampanye politik gelap menggunakan bot otomatis untuk memproduksi dan menyebarkan ribuan postingan palsu yang terlihat seperti dukungan asli dari pengguna media sosial. Ini menambah kebingungan di antara pengguna biasa, yang mungkin tidak menyadari bahwa informasi yang mereka terima adalah hasil manipulasi.

Pemilu 2019 di Indonesia menunjukkan bagaimana hoaks bisa memecah masyarakat berdasarkan sentimen agama dan politik, dan tren ini diperkirakan akan semakin memburuk pada Pemilu 2024. Berbagai klaim palsu tentang kecurangan pemilu, karakter kandidat, atau kebijakan pemerintah bisa dengan cepat menyebar, menciptakan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi.

Meskipun platform media sosial telah menambahkan fitur pelaporan konten palsu serta kolaborasi dengan pihak ketiga untuk melakukan verifikasi fakta, jumlah berita hoaks yang beredar masih sangat tinggi. Literasi digital masyarakat menjadi salah satu kunci untuk melawan hoaks, tetapi tingkat literasi digital di Indonesia masih relatif rendah. Banyak pengguna yang tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk memverifikasi kebenaran informasi yang mereka terima dan bagikan. Peran media sosial dalam penyebaran berita hoaks selama pemilu sangatlah besar dan kompleks.

2.4. Implikasi Berita Hoak terhadap Kualitas Pemilu

Berita hoaks tentang Pemilu yang tersebar bisa memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas dan integritas demokrasi. Berita hoaks, yang merupakan informasi palsu yang sengaja disebar untuk menyesatkan

publik, mampu memengaruhi berbagai aspek dalam proses pemilihan umum. Salah satu dampak terbesar adalah rusaknya kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu itu sendiri. Proses pemilu yang seharusnya berjalan dengan prinsip LUBERJURDIL dapat ternoda oleh penyebaran berita-berita hoaks yang tidak berdasar, mengakibatkan keraguan terhadap hasil pemilu serta menciptakan suasana ketidakpastian dan polarisasi di kalangan masyarakat.

Berita hoaks mampu mempengaruhi persepsi publik, baik terhadap calon yang bersaing dalam pemilu maupun terhadap sistem pemilu itu sendiri. Salah satu contoh umum adalah klaim-klaim palsu terkait kecurangan pemilu, yang dapat menyebabkan pemilih merasa skeptis terhadap hasil pemilu bahkan sebelum proses penghitungan suara selesai. Ketika masyarakat terpapar informasi yang salah, seperti tuduhan bahwa pemilu telah direayasa atau dimanipulasi, kepercayaan terhadap proses demokrasi menurun. Hal ini dapat menimbulkan efek jangka panjang di mana ketidakpercayaan terhadap hasil pemilu memicu protes, ketidakpuasan, dan bahkan konflik sosial di antara pendukung calon yang merasa dirugikan.

Implikasi lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya polarisasi sosial sebagai akibat dari penyebaran berita hoaks. Polarisasi terjadi ketika masyarakat terbelah menjadi kelompok-kelompok yang saling bertentangan, sering kali berdasarkan sentimen politik, agama, atau ideologi tertentu. Berita hoaks dalam pemilu sering kali dirancang untuk memanfaatkan perbedaan ini, memperburuk ketegangan sosial dan memicu permusuhan di antara

kelompok yang berbeda. Misalnya, hoaks yang menyebarkan informasi palsu tentang calon tertentu dapat memperkuat stereotip atau prasangka yang sudah ada di dalam masyarakat, sehingga memperlebar jurang perbedaan di antara kelompok-kelompok pemilih. Dampak ini bukan hanya membahayakan proses pemilu itu sendiri, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dalam jangka panjang.

Selain itu, berita hoaks juga memiliki dampak langsung terhadap keputusan individu dalam memberikan suara. Ketika pemilih terpapar informasi palsu yang dirancang untuk menyesatkan, mereka mungkin membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta atau informasi yang valid. Sebagai contoh, seorang pemilih mungkin memutuskan untuk tidak mendukung seorang calon presiden setelah membaca berita hoaks yang menyebutkan bahwa calon tersebut terlibat dalam skandal yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Ini tentu saja sangat merugikan bagi calon yang diserang, karena reputasinya telah dicemarkan oleh informasi palsu. Di sisi lain, pemilih yang termanipulasi oleh berita hoaks tersebut juga dirugikan karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk membuat pilihan yang benar-benar didasarkan pada informasi yang valid.

Sebagai tambahan, berita hoaks juga dapat mengurangi tingkat partisipasi pemilih. Ketika pemilih merasa bingung atau skeptis terhadap proses pemilu, mereka mungkin memutuskan untuk tidak menggunakan hak suara mereka. Apatisme pemilih ini disebabkan oleh ketidakpastian yang dihasilkan dari penyebaran informasi yang salah. Misalnya, jika seorang

pemilih mendengar klaim bahwa seluruh sistem pemilu telah dicurangi, mereka mungkin merasa bahwa suaranya tidak akan berpengaruh, sehingga memilih untuk tidak berpartisipasi sama sekali. Ini merupakan salah satu dampak paling merusak dari berita hoaks, karena partisipasi pemilih yang rendah dapat mengurangi legitimasi hasil pemilu dan merusak demokrasi.

Contoh nyata dari dampak berita hoaks dalam pemilu dapat dilihat selama Pemilu 2019 di Indonesia. Salah satu berita hoaks yang paling mencolok adalah klaim bahwa salah satu calon presiden terlibat dalam skandal korupsi besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Berita ini menyebar dengan cepat melalui media sosial, terutama melalui platform seperti WhatsApp dan Facebook. Banyak pengguna yang membagikan berita tersebut tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu, sehingga informasi palsu tersebut semakin meluas dan dipercaya oleh sebagian besar masyarakat. Akibatnya, dukungan terhadap calon presiden tersebut menurun secara signifikan, meskipun klaim tersebut kemudian terbukti tidak benar. Kasus ini menunjukkan bagaimana berita hoaks dapat merusak reputasi seorang calon, memanipulasi opini publik, dan pada akhirnya memengaruhi hasil pemilu.

Di samping merusak reputasi calon, berita hoaks juga dapat memicu krisis kepercayaan di kalangan masyarakat. Setelah Pemilu 2019, banyak pemilih yang merasa skeptis terhadap hasil pemilu, terutama karena mereka terpengaruh oleh klaim-klaim palsu yang beredar selama kampanye. Klaim tentang kecurangan pemilu, pengelembungan suara, atau manipulasi data pemilih membuat banyak masyarakat meragukan transparansi dan keabsahan

proses pemilu. Ketidakpercayaan ini diperparah oleh fakta bahwa informasi palsu yang disebarakan melalui media sosial sering kali sulit untuk dibantah secara efektif, karena penyebarannya yang begitu cepat dan meluas. Akibatnya, meskipun pemerintah atau pihak berwenang berusaha mengklarifikasi informasi tersebut, banyak masyarakat yang tetap terpengaruh oleh hoaks yang sudah mereka percaya.

Untuk mengatasi dampak buruk dari berita hoaks, upaya serius diperlukan dari berbagai pihak. Platform media sosial, misalnya, harus lebih proaktif dalam memantau dan menindak akun-akun yang terbukti menyebarkan berita hoaks. Pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait penyebaran berita palsu, termasuk dengan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku penyebaran hoaks. Selain itu, literasi digital masyarakat harus ditingkatkan agar mereka lebih kritis dalam menerima dan menyebarkan informasi.

Berita hoaks tidak hanya mengubah persepsi pemilih dan mempengaruhi hasil pemilu, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem demokrasi itu sendiri. Untuk menjaga kualitas pemilu yang bebas dan adil, seluruh elemen harus bersinergi dalam menangani penyebaran berita hoaks, serta mendidik masyarakat agar lebih kritis dalam menerima informasi di era digital.

BAB III

PERSEPSI MAHASISWA FISIP UNDIP ANGKATAN 2022 TERHADAP BERITA HOAKS DI APLIKASI TIKTOK PADA PEMILIHAN PILPRES 2024

3.1. Hasil Uji Instrumen Penelitian

3.1.1. Uji Validitas

Uji validitas ialah proses statistik yang dilakukan guna mengukur sejauh mana alat penelitian dapat mengukur atau menghasilkan data yang akurat dan tepat untuk menggambarkan konsep ataupun variabel yang ingin diukur. Uji validitas bertujuan guna menilai sejauh mana alat ukur mampu mengukur variabel yang dituju secara akurat dan stabil. Peneliti menguji dengan rumus pearson product moment menggunakan bantuan SPSS 29. Berikut hasil uji validitas dari item-item pertanyaan yang diajukan peneliti pada studi ini:

Tabel 3. 1 Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Penggunaan Sosial Media (X1)	X1.1	0.728	0.2096	Valid
	X1.2	0.716	0.2096	Valid
	X1.3	0.632	0.2096	Valid
	X1.4	0.671	0.2096	Valid
	X1.5	0.635	0.2096	Valid
	X1.6	0.648	0.2096	Valid
Uses & Gratification (X2)	X2.1	0.679	0.2096	Valid
	X2.2	0.714	0.2096	Valid
	X2.3	0.770	0.2096	Valid
	X2.4	0.753	0.2096	Valid
	X2.5	0.680	0.2096	Valid
	X2.6	0.754	0.2096	Valid
Persepsi (Y)	Y.1	0.672	0.2096	Valid